

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Era postmodern ditandai dengan kegagalan modernitas yang cenderung ke arah pragmatis, teknis, rasional, dan sekuler. Lembaga yang tumbuh dan kembang bersama dengan individu, masyarakat, dan pemerintah bukanlah mesin yang dapat di atur dan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan hasilnya. Upaya transformasi dilakukan sebab adanya berbagai macam problem baik filosofis, sosial, maupun psikologis. Masalah seperti moral intelektual, globalisasi, tuntutan masyarakat, terorisme, dan sebagainya adalah tanggung jawab bersama sebagaimana karakter pendidikan Islam yang berusaha menyelamatkan manusia dengan berbagai macam tugas dan peranan lembaga pendidikan Islam masing-masing.

Lembaga pendidikan Islam dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dalam makna, menghasilkan sebuah pandangan dunia yang dapat terus menerus berubah dan dimodifikasi. Oleh karena itu, tesis ini fokus dengan pendekatan kualitatif menjelaskan dua hal yakni apa saja transformasi paradigma dan bagaimana terhadap lembaga pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003.

Transformasi paradigma lembaga pendidikan Islam terjadi sebab reformasi perundangan sisdiknas, reorientasi tujuan yang mengedepankan akhlak pekerti, dan perubahan format kelembagaan dalam pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas no. 20 Tahun 2003.

Transformasi lembaga pendidikan Islam dengan berbagai corak, tipologi, dan bentuk dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 akan dijabarkan di bawah ini. Cerminan transformasi kelembagaan ini diturunkan dari perundangan UU menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Paradigma yang mendasari transformasi mula-mula memiliki akar dan pergeseran paradigma sejak abad ke-20. Di antaranya adalah faktor inheren ajaran Islam yang terbuka, situasi politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, serta kondisi psikologis sebagai bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Transformasi yang terjadi antara lain pembaharuan sistem madrasah dalam pesantren sejak abad ke-20 serta sistem perundangan yang diselenggarakan pasca reformasi 1999 di Indonesia dengan otonomisasinya menyebabkan paradigma desentralisasi menjadi gagasan.

Transformasi kelembagaan beserta paradigma yang mendasari dapat disimpulkan dalam penelitian yang berjudul, “ Transformasi Paradigma Lembaga Pendidikan Islam Pasca UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 “, sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan Formal

- a. Pendidikan Dasar (Pasal 17) : SD dan MI atau yang sederajat; SMP dan MTs atau yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah (Pasal 18) : SMA dan MA, SMK dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi (Pasal 20) : Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

Pelajaran Agama Islam di pendidikan dasar dan menengah pada lembaga sekolah formal diberikan dalam porsi sebagai mata pelajaran yang lebih sedikit materinya dibandingkan di madrasah formal. Format pelajaran sistem madrasah diajarkan di lembaga “sekolah Islam”. Transformasi lainnya adalah perpaduan jenis lembaga ini dengan pesantren dilakukan dalam konteks pendidikan terpadu. Khusus lembaga sekolah juga memiliki model plus madrasah yakni memberi porsi pelajaran madrasah. Model lembaga ini muncul sebab pergeseran paradigma sentralisasi-desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan pemerintah lewat kementerian yang berbeda. Kesimpulannya, sekolah dan madrasah serta jenjang pendidikan kesetaraan adalah tiga institusi formal yang menjalankan peranan pendidikan agama.

2. Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26) : lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan jenis pendidikan yang sejenis.

3. Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27) : kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
4. Pendidikan Usia Dini (Pasal 28) : TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Keagamaan (Pasal 30) : Dalam poin yang ke-4 yaitu Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samena, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah dan pesantren dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam bidang pendidikan keagamaan terdiri atas dua jenis yakni :
 - a. Pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal dilakukan berjenjang dari pendidikan diniyah usia dini, dasar, menengah pertama, menengah atas, dan tingkat tinggi.
 - b. Pendidikan diniyah nonformal. Secara nonformal jika pendidikan diniyah dilaksanakan dalam bentuk satuan pendidikan dapat berupa pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyyah, atau bentuk lain yang sejenis.
 - c. Pendidikan diniyah informal. Cirinya tidak dalam satuan pendidikan, baik dalam keluarga maupun lingkungan.

Kehadiran pesantren dengan berbagai model kelembagaan lain baik dalam pendidikan agama maupun keagamaan merupakan upaya menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Semakin lengkap elemen suatu

pesantren, semakin luas pula tujuan yang ingin dicapai dan variasi kelembagaan pun makin beragam. Jadi, lembaga pendidikan Islam yang formal pasca UU Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 adalah dijadikannya lulusan pendidikan keagamaan di pesantren diakui sama formalnya dengan sekolah dan madrasah.

Sistem ini memungkinkan paradigma transformasi kepemimpinan kiai dalam pesantren salaf menjadi modern (yayasan), sistem kurikulum atau bagaimana strategi mengkomunikasikan, dan perundangan atau adat. Tiga pergeseran paradigma ini juga berlaku untuk lembaga lain.

Transformasi lembaga pendidikan Islam yang terbesar pada lembaga keagamaan ini dimana kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk dapat melanjutkan sesuai dengan jenjang yang sederajat sebab adanya penghargaan sederajat baik terhadap pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal.

B. Rekomendasi

Demi tuntutan masyarakat dan globalisasi kehadiran lembaga pendidikan Islam harus senantiasa berubah dengan tetap mempertahankan keunggulannya. Peran yang saling melengkapi dalam berbagai insitusi secara formal, informal, dan nonformal adalah penguatan peran dan fungsi pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Penguatan identitas bangsa dan negara diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang

terjadi seperti korupsi, radikalisme dan terorisme, kenakalan remaja, daerah tertinggal, lingkungan hidup, masyarakat multikultural, dan sebagainya.

Tesis ini masih jauh dari sempurna. Fokus paradigma berdasarkan keilmuan tertentu terhadap variabel kelembagaan dan kurikulum akan menarik dibahas, semisal dalam perspektif politik pendidikan di mana terdapat berbagai konflik aliran dan perkembangan ideologi. Namun, sedikit karya ini tentu saja berguna bagi siapapun yang ingin menggali pergeseran atau transformasi lembaga pendidikan Islam.